

**PENGUATAN KAPASITAS KELOMPOK TANI HUTAN
KEMASYARAKATAN DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN
MASYARAKAT DI DESA SALI-SALI KABUPATEN PINRANG**

Disusun dan Diajukan Oleh

AHMAD SABRI

(M012202008)



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KEHUTANAN

FAKULTAS KEHUTANAN

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2022

**PENGUATAN KAPASITAS KELOMPOK TANI HUTAN
KEMASYARAKATAN DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN
MASYARAKAT DI DESA SALI-SALI KABUPATEN PINRANG**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi
Magister Ilmu Kehutanan

Disusun Dan Di Ajukan Oleh

AHMAD SABRI

Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

**PENGUATAN KAPASITAS KELOMPOK TANI HUTAN
KEMASYARAKATAN DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN
MASYARAKAT DI DESA SALI-SALI KABUPATEN PINRANG**

Disusun Dan Diajukan Oleh

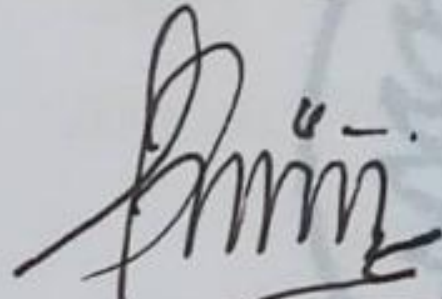
AHMAD SABRI
Nomor Pokok M012202008

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal 17 April 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Penasehat,

Pembimbing Utama



Dr. Ir. M. Ridwan, M.SE
NIP. 19680112 199403 1 001

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Ir. Yusran, S.Hut., M.Si., IPU
NIP. 19691206 199603 1 004

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Kehutanan



Mukrimin, S. Hut., M.P., Ph.D
NIP. 19780209 200812 1 001

Dekan Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin



Dr. A. Mujetahid M., S. Hut., M.P
NIP. 19690208 199702 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Sabri

Nomor Mahasiswa : M012202008

Program Studi : Ilmu Kehutanan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis berjudul "Penguatan Kapasitas Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Desa Sali-Sali Kabupaten Pinrang" yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dengan arahan dari komisi pembimbing Dr. Ir. M. Ridwan, M. SE sebagai pembimbing utama dan Prof. Dr. Ir. Yusran, S. Hut., M.Si., IPU sebagai Pembimbing Pendamping. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada Perguruan Tinggi Manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya saya berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin

Makassar, April 2023

Yang menyatakan



Ahmad Sabri

NIM. M012202008

PRAKATA

Alhamdulillah, penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kekuatan serta kelancaran kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister pada Program Studi Ilmu Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak akan sangat sulit untuk menyelesaikan dalam penyusunan tesis. Oleh karenanya, pada kesempatan ini secara khusus dan penuh kerendahan hati penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada Dr. Ir. M. Ridwan, M.SE dan Prof. Dr. Ir. Yusran, S.Hut., M.Si.,IPU selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing serta memberi arahan dalam penyusunan tesis ini.

Terkhusus salam hormat dan kasih saya kepada kedua orangtua tercinta, ayahanda Muhammad Darwis dan ibunda Nurbaedah serta ketiga saudara saya, Ahmad Badawi, Siti Nur Sofyanti dan Siti Nur Fazila beserta keluarga besar Almarhum Onnong Talo yang selalu memberikan motivasi, dukungan, doa, serta cinta kasih. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan limpahan berkah dan hidayah-Nya kepada beliau. Dengan segala kerendahan hati penulis juga mengucapkan rasa terima kasih khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. forest. Muhammad Alif KS, S.Hut., M.Si., Bapak Dr. Ir. Andi Sadapotto, MP, dan Bapak Mukrimin, S.Hut.,M.P.,Ph.D., selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran, bantuan serta koreksi dalam penyusunan tesis.
2. Keluarga besar Puang Onnong dan Puang Talo yang tidak bisa saya sebut satu persatu, terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan atas semua doa, dukungan dan motivasi dalam penyelesaian akademik penulis.
3. Keluarga besar FOKAL IMM Fakultas Pertanian Unismuh Makassar dan adik-adik Pikom IMM Pertanian saya ucapkan banyak terima kasih karena telah menjadi bagian dari support system dalam perjalanan perkuliahan saya.
4. Keluarga Besar Prodi Kehutanan, Bapak dan Ibu Dosen yang tak henti-hentinya memberi masukan dan semangat dalam melanjutkan karir perkuliahan saya.
5. Keluarga Besar Magister Ilmu Kehutanan angkatan 2020 (2) yang telah ikut berpartisipasi dan membantu dalam penelitian serta penyusunan tesis ini.
6. Pemerintah Desa Sali-Sali dan KTH Tradisi yang dengan lapang dada menerima dan memberikan izin kepada saya untuk melakukan penelitian.
7. Dinny Israyta Pratiwi yang tak henti-hentinya memberikan support dan dukungan, terima kasih banyak telah mendampingi dalam menyelesaikan akademik saya sampai saat ini.

8. Kepada saudara Alamsyah, S.Hut. dan Zulkifli, S.Hut. yang senantiasa dan dengan rasa ikhlas menemani penulis selama berada di lokasi penelitian.

Dengan keterbatasan ilmu dan pengetahuan, penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis berharap semoga hasil penelitian yang tertuang dalam Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya.

Makassar, April 2023

Ahmad Sabri

ABSTRAK

AHMAD SABRI, Penguatan Kapasitas Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat di desa Sali-Sali Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, di bawah bimbingan M. Ridwan dan Yusran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kapasitas kelembagaan KTHKm Tradisi berdasarkan Permenhut No. 57 Tahun 2014, mengidentifikasi kinerja kelembagaan berdasarkan 8 (delapan) prinsip ostrom, dan merumuskan strategi alternatif penguatan kelembagaan dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat desa Sali-Sali Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sali-Sali Kabupaten Pinrang dengan melibatkan 29 orang anggota KTHKm Tradisi dan 5 orang pakar sebagai responden penelitian. Tahapan penelitian ini terdiri dari pengamatan dilapangan, mengumpulkan data menggunakan kuesioner, analisis faktor internal dan eksternal, serta dilanjutkan dengan merumuskan strategi alternatif dengan menggunakan analisis SWOT dan pendekatan AHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan KTHKm Tradisi berdasarkan Permenhut No. 57 Tahun 2014 berada pada kategori madya dengan skor 505, hal ini menunjukkan tahap pembinaan yang harus dilakukan adalah kelola kawasan dan kelola usaha. Kemudian kinerja kelembagaan berdasarkan 8 (delapan) prinsip ostrom berada pada kategori rendah dengan skor 13. Untuk alternative strategi yaitu; 1) melakukan penguatan kelembagaan dengan mengaktifkan kepengurusan KTHKm melalui perencanaan program kerja yang *responsive* pada kebutuhan anggota, 2) meningkatkan peran sumber daya manusia kelompok tani hutan dalam pengelolaan kawasan huta kemasyarakatan secara kolaboratif dengan instansi terkait, dan 3) meningkatkan jiwa wirausaha kelompok tani hutan untuk menangkap peluang bisnis dari hasil pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Kata Kunci: Kelembagaan, KTHKm, SWOT, AHP

ABSTRACT

AHMAD SABRI, Strengthening the Capacity of Community Forest Farmer Groups in Efforts to Increase Community Income in Sali-Sali Village, Pinrang Regency, under the guidance of M. Ridwan and Yusran.

This study aims to identify the institutional capacity of KTHKm Tradisi based on Permenhut No. 57 of 2014, identifying institutional performance based on 8 (eight) Ostrom principles, and formulating alternative strategies for institutional strengthening in an effort to increase the income of the people of Sali-Sali Village, Pinrang Regency. This research was conducted in Sali-Sali Village, Pinrang Regency, involving 29 members of KTHKm Tradisi and 5 experts as research respondents. The stages of this research consisted of field observations, collecting data using questionnaires, analyzing internal and external factors, and continuing to formulate alternative strategies using SWOT analysis and the AHP approach. The results showed that the institutional capacity of KTHKm Tradisi based on Permenhut No. 57 of 2014 is in the middle category with a score of 505, this shows that the stage of development that must be carried out is area management and business management. Then institutional performance based on 8 (eight) Ostrom principles is in the low category with a score of 13. For alternative strategies, namely; 1) carry out institutional strengthening by activating KTHKm management through planning work programs that are responsive on the needs of members, 2) increasing the role of forest farmer group human resources in managing community forest areas collaboratively with related agencies, and 3) increasing the entrepreneurial spirit of forest farmer groups to seize business opportunities from the collection of non-timber forest products.

Keywords: Institutional, KTHKm, SWOT, AHP

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
PRAKATA	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Hutan Kemasyarakatan (HKm).....	7
B. Kelembagaan Masyarakat (Kelompok Tani Hutan)	8
1. Peraturan Menteri Kehutanan No. 57 Tahun 2014	11
2. 8 (Delapan) Prinsip Common	11
C. Analisis SWOT	13
1. Analisis Faktor Internal	14
2. Analisis Faktor Eksternal	15
D. Analisis AHP	18
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Waktu dan Tempat	21

B. Alat dan Bahan Penelitian.....	21
C. Populasi dan Sampel.....	21
D. Teknik Pengumpulan Data.....	22
E. Jenis Data.....	23
F. Teknik Analisis Data	24
1. Mendeskripsikan kondisi kelembagaan KTH Tradisi	24
2. Analisis SWOT.....	28
3. Analisis AHP	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Sejarah Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat	38
B. Rencana Kerja Kegiatan Pengelolaan Hutan	39
C. Kapasitas Kelembagaan Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. 57 Tahun 2014.....	41
D. Kinerja Kelembagaan Berdasarkan 8 (delapan) Prinsip Ostrom.....	49
E. Strategi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Tani	56
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Matriks SWOT	1
Tabel 2. Indikator Penilaian Kemampuan Kelola Kelembagaan KTH.....	25
Tabel 3. Indikator Penilaian Keberlanjutan Kelembagaan KTH Tradisi	28
Tabel 4. Matriks SWOT	30
Tabel 5. Penilaian Intensitas Kepentingan	32
Tabel 6. Keterangan Bagan Hirarki SWOT-AHP	36
Tabel 7. Aspek dan Indikator Penilaian Kemampuan KTH Tradisi	42
Tabel 8. Hasil Penilaian Kinerja Kelembagaan KTH Tradisi.....	49
Tabel 9. Nilai Rata-Rata Faktor Internal	57
Tabel 10. Nilai Rata-Rata Faktor Eksternal	59
Tabel 11. Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan Faktor Kekuatan.....	62
Tabel 12. Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan Faktor Kelemahan.....	63
Tabel 13. Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan Faktor Peluang.....	64
Tabel 14. Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan Faktor Ancaman.....	65
Tabel 15. Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan AHP Antara Kelompok SWOT	66
Tabel 16. Nilai Prioritas dan <i>Consistency Ratio</i> Pada Kelompok SWOT dan Faktor- Faktor SWOT	68
Tabel 17. Rumusan Strategi Penguatan Kelembagaan dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	72
Tabel 18. Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan Strategi SO	77
Tabel 19. Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan Strategi ST	78

Tabel 20. Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan Strategi WO	79
Tabel 21. Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan Strategi WT	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian	20
Gambar 2. Bagan Hirarki SWOT-AHP	35
Gambar 3. Peta Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan KTH Tradisi	51
Gambar 4. Grafik Prioritas Global Kelompok	71
Gambar 5. Grafik Alternatif Strategi	81

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pengelolaan hutan di Indonesia dewasa ini belum beranjak dari dua persoalan serius yang sudah sejak lama dihadapi, yakni kemiskinan masyarakat desa hutan dan kerusakan sumber daya hutan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016 tercatat sekitar 48,8 juta jiwa atau 12% dari 219,9 juta jiwa penduduk Indonesia tinggal di dalam dan sekitar hutan. Dari 48,8 juta jiwa penduduk yang tinggal di dalam dan sekitar hutan tersebut 10,2 juta jiwa atau 25% diantaranya tergolong dalam kategori miskin. Sebagian besar dari mereka pada umumnya menggantungkan hidup dari sumber daya hutan yang ada di sekitarnya.

Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, sesungguhnya dapat menjadi pilar bagi terciptanya pengelolaan hutan lestari. Perilaku mereka merupakan komponen krusial dalam mengelola dan melestarikan hutan. Bentuk perilaku negatif masyarakat sekitar hutan mengarah pada pengeksploitasian dan pemanfaatan hutan yang berlebihan sehingga menyebabkan kerusakan hutan (Basir et al., 2020).

Salah satu upaya pokok pembangunan kehutanan adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat di dalam dan sekitar hutan untuk berpartisipasi dalam kehutanan melalui perhutanan sosial, khususnya di dalam kawasan hutan Kemasyarakatan (HKm). Dalam Permenhut Nomor:

P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan menyatakan bahwa penyelenggaraan HKm dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses kepada masyarakat setempat untuk mengelola kawasan hutan secara lestari guna penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan serta untuk menyelesaikan persoalan sosial. Kaskoyo et al., (2014) menjelaskan bahwa tujuan program HKm untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutannya.

Secara nasional, pelaksanaan konsep HKm telah dikembangkan pada 22 provinsi dengan luas keseluruhan sekitar 448.217 Ha yang terdiri dari areal usulan penetapan wilayah HKm (162. 112,91 Ha), areal pembangunan HKm (208.327 Ha), areal kerja (55.420 Ha) dan areal yang diberi ijin sementara (62.357 Ha). Total kelompok masyarakat yang terlibat pada kegiatan HKm adalah 519 kelompok (Nandini dalam Muhdar, 2018).

Keberadaan hutan kemasyarakatan tidak serta merta diterima oleh masyarakat. Menurut (Heryatna et al., 2015) pentingnya persepsi masyarakat tentang tujuan dan manfaat hutan kemasyarakatan sebagai salah satu sistem dalam kehutanan untuk dikelola dengan baik dan benar sehingga mencapai tujuan dalam melestarikan dan mensejahterakan masyarakat. Gbedomon et al., (2016) juga mengungkapkan adanya peningkatan pendapatan rumah tangga petani hutan masyarakat di Afrika Barat karena adanya akses untuk memanfaatkan hasil hutan melalui hutan kemasyarakatan.

Melalui akses legal pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hutan pada hutan kemasyarakatan dapat melalui kelembagaan masyarakat seperti kelompok tani hutan. berdasarkan Permenhut No 57 tahun 2014 adalah kumpulan petani atau perorangan warga Negara Indonesia beserta keluarganya yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan yang meliputi usaha hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan, baik di hulu maupun di hilir. Sedangkan Ostrom, (1990) Penataan kelembagaan (*institutional arrangements*) dapat ditentukan oleh beberapa unsur: aturan operasional untuk pengaturan pemanfaatan sumber daya, aturan kolektif untuk menentukan, menegakan hukum atau aturan itu sendiri dan untuk merubah aturan operasional serta mengatur hubungan kewenangan organisasi.

Keberhasilan kelompok tani hutan dalam mengelola hutan kemasyarakatan dapat di lihat dari adanya peningkatan pendapatan masyarakat. Karena pengelolaan hutan kemasyarakatan secara personal akan berbeda dengan pengelolaan secara kelembagaan, karena lembaga dijadikan suatu wadah oleh masyarakat setempat dalam menjalankan suatu program dimana lembaga memiliki aturan main dalam mengelola dan menggarap lahan HKm. Menurut Hermanto et al. dalam Rahmat Safe'i (2019) menyebutkan partisipasi aktif gapoktan dalam kegiatan kelembagaan memberikan dampak positif yaitu berupa peningkatan pendapatan dari usaha tani yang sangat signifikan.

Desa Sali-sali adalah salah satu desa di kabupaten Pinrang yang memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6391/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2019 seluas 85 ha. Hutan Kemasyarakatan (HKm) dikelola oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) Tradisi dengan jumlah anggota 29 orang.

Berdasarkan dari angka kemiskinan masyarakat sekitar hutan dan kerusakan hutan yang diakibatkan oleh keterdesakan ekonomi serta adanya hak pengelolaan hutan berbasis kelembagaan masyarakat lokal. Maka fokus penelitian ini adalah penguatan kapasitas kelompok tani hutan kemasyarakatan dan menyusun strategi dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat di Desa Sali-Sali Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kapasitas kelembagaan kelompok tani hutan kemasyarakatan Tradisi berdasarkan Permenhut No. 57 Tahun 2014?
2. Bagaimana kinerja kelembagaan kelompok tani hutan kemasyarakatan Tradisi menggunakan 8 (delapan) prinsip Ostrom?

3. Bagaimana strategi alternatif penguatan kelembagaan yang tepat dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat di desa Sali-sali Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan dan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kapasitas kelembagaan kelompok tani hutan kemasyarakatan Tradisi berdasarkan Permenhut No. 57 Tahun 2014.
2. Menganalisis kinerja kelembagaan kelompok tani hutan kemasyarakatan Tradisi menggunakan 8 (delapan) prinsip Ostrom.
3. Merumuskan strategi alternatif penguatan kelembagaan dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Sali-sali Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dapat memberi informasi bagi pemerintah daerah setempat dan atau dinas terkait mengenai penguatan kelembagaan kelompok tani hutan kemasyarakatan dalam upaya peningkatan pendapatan.
2. Penelitian ini dapat menyediakan bahan informasi bagi kelompok tani hutan tentang cara tepat penguatan kelembagaan, sehingga dapat

meningkatkan kinerja kelompok tani hutan dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan dan sumber informasi bagi peneliti selanjutnya terkait penguatan kelembagaan kelompok tani hutan dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat, di Kabupaten Pinrang.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Pemerintah pusat hingga pemerintah daerah telah banyak berupaya untuk memberdayakan masyarakat. Salah satu dari usaha pemerintah dalam usaha memberdayakan masyarakat yaitu melalui kegiatan Hutan Kemasyarakatan (HKm) (Hadidja et al., 2016). Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial, pada Bab 1 pasal 3 mengatakan hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat HKm adalah kawasan hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.

Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat dalam mengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat.

Hutan kemasyarakatan menurut definisi Gilmour dan Fisher yang disitasi Soemarwoto dalam Hadidja et al (2016) adalah pengendalian dan pengelolaan sumberdaya hutan oleh masyarakat lokal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sebagai bagian terpadu dari sistem pertanian setempat.

Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, sesungguhnya dapat menjadi pilar bagi terciptanya pengelolaan hutan lestari. Perilaku mereka merupakan komponen krusial dalam mengelola dan melestarikan hutan. Bentuk perilaku negatif masyarakat sekitar hutan mengarah pada pengeksploitasian dan pemanfaatan hutan yang berlebihan sehingga menyebabkan kerusakan hutan (Basir et al., 2020). Dhruva Bijaya et al., (2015) mengutip bahwa Hutan Kemasyarakatan hanya merupakan sumber daya alam yang berorientasi pada masyarakat dimana masyarakat memiliki hak untuk menggunakan dan mengelola sumber dayanya tanpa ada hambatan.

Melalui pembangunan HKM, masyarakat yang berada di dalam dan sekitar hutan diperlakukan dan diakui sebagai bagian yang tak terpisahkan dari ekosistem yang saling memengaruhi dan saling bergantung satu sama lain (Purwoko dalam Mulyadin, 2016). Melalui program hutan kemasyarakatan diharapkan mampu mewujudkan pengembangan kapasitas dan memberikan akses kepada masyarakat sekitar guna ketersediaan lapangan pekerjaan juga sebagai jawaban pada persoalan aspek sosial ekonomi masyarakat.

B. Kelembagaan Masyarakat (Kelompok Tani Hutan)

Kelembagaan merupakan aturan dan rambu-rambu sebagai panduan untuk mengatur hubungan yang saling mengikat atau saling tergantung satu sama lain dalam suatu kelompok masyarakat. Penataan kelembagaan (*institutional arrangements*) dapat ditentukan oleh beberapa unsur: aturan

operasional untuk pengaturan pemanfaatan sumber daya, aturan kolektif untuk menentukan, menegakan hukum atau aturan itu sendiri dan untuk merubah aturan operasional serta mengatur hubungan kewenangan organisasi

Lembaga diartikan sebagai organisasi yang membentuk, menunjang dan melindungi hubungan normatif dan pola-pola kegiatan tertentu dan sekaligus membentuk fungsi-fungsi dan jasa yang dihargai didalam suatu lingkungan. Oleh karena itu pembangunan lembaga didefenisikan sebagai seluruh perencanaan, pembuatan struktur dan petunjuk-petunjuk baru, atau penataan kembali haluan organisasi, meliputi:

1. Membuat, mendukung dan memperkuat hubungan normatif dan pola-pola yang aktif,
2. Pembentukan fungsi-fungsi dan jasa yang dihargai oleh masyarakat,
3. Penciptaan fasilitas yang menghubungkan antara teknologi-teknologi baru dengan lingkungan sosialnya (Noor, 2016).

Kelembagaan yang baik dan efektif akan menjamin keberlanjutan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. Berbagai kajian kelembagaan telah menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan hutan oleh masyarakat tidak dapat dilepaskan dari kekuatan nilai dan norma yang telah mengakar dan diterima secara luas oleh masyarakat (Didik et al., 2015). Praktik-praktik yang dilakukan oleh masyarakat tersebut menjadi bukti pentingnya sumberdaya hutan bagi kehidupan masyarakat.

Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, sesungguhnya dapat menjadi pilar bagi terciptanya pengelolaan hutan lestari. Suwigna et al., (2010) juga menyatakan bahwa aspek yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan adalah faktor manusia diantaranya adalah kelembagaan organisasi kelompok tani hutan.

Keikutsertaan masyarakat dalam kelompok tani hutan untuk mengelola hutan kemasyarakatan merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang efektif dalam meningkatkan pendapatan. Slamet dalam Suwignya et.al (2010) menyatakan bahwa paradigma baru penyuluhan adalah melalui pendekatan kelompok. Materi penyuluhan yang disajikan melalui kelompok lebih efisien dan mempunyai konsekuensi dibentuknya kelompok-kelompok tani sehingga mendorong terjadinya interaksi antar petani dalam wadah kelompok itu.

Interaksi antar petani dalam kelompok sangat penting sebab merupakan forum komunikasi yang demokratis di tingkat akar rumput. Forum kelompok merupakan forum belajar sekaligus forum pengambilan keputusan untuk memperbaiki nasib mereka sendiri. Melalui forum tersebut pemberdayaan ditumbuhkan yang berlanjut pada tumbuh dan berkembangnya kemandirian rakyat tani. Melalui kelompok-kelompok itu kepemimpinan di kalangan petani tumbuh dan berkembang melalui pembinaan penyuluh pertanian (Suwignya et. al, 2010).

1. Peraturan Menteri Kehutanan No. 57 Tahun 2014

Berdasarkan Permenhut No. 57 tahun 2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan pada pasal 1 ayat 9 menyatakan bahwa kelompok tani hutan yang selanjutnya disingkat KTH adalah kumpulan petani atau perorangan warga Negara Indonesia beserta keluarganya yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan yang meliputi usaha hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan, baik di hulu maupun di hilir.

Azizah et al., (2021) menyatakan perlu adanya pengetahuan dalam pengelolaan kelembagaan sebagai tolak ukur kemampuan sumber daya manusia. Mengacu pada Permenhut No. 57 tahun 2014 sebagaimana maksud dari pembinaan kelompok tani hutan tertuang pada pasal 2 ayat 1 yang menjadi tolak ukur kemampuan sumber daya manusia yaitu :

- a. Kelola Kelembagaan yaitu hal-hal yang berkaitan dengan administrasi kelompok tani hutan.
- b. Kelola Kawasan yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan kelompok dalam mengelola kawasan.
- c. Kelola usaha yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kapasitas kelompok dalam mengelola usaha.

2. 8 (Delapan) Prinsip Common

Ostrom, (1990) Penataan kelembagaan (*institutional arrangements*) dapat ditentukan oleh beberapa unsur: aturan operasional untuk pengaturan

pemanfaatan sumber daya, aturan kolektif untuk menentukan, menegakan hukum atau aturan itu sendiri dan untuk merubah aturan operasional serta mengatur hubungan kewenangan organisasi.

Pengelolaan sumber daya hutan dalam sebuah kelembagaan harus mengedepankan prinsip berkelanjutan atau bertahan lama. Menurut Ostrom dalam Azizah et al., (2021) analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja kelembagaan tersebut mengacu pada delapan prinsip kelembagaan yang berkelanjutan menggunakan teori Ostrom, kedelapan prinsip tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mendefinisikan batasan secara jelas. Batasan pada sistem sumber daya dan pada sejumlah individu terutama berkaitan dengan hak dan tanggung jawab untuk menggunakan sumber daya hutan.
- b. Proporsional antara keuntungan dan biaya. Aturan yang mengatur distribusi biaya dan manfaat atas sumber daya hutan termasuk aturan tenaga kerja, material dan uang.
- c. Merancang pilihan kolektif. Menyangkut intensitas partisipasi dalam memodifikasi aturan oprasional.
- d. Monitoring. Aturan yang mengatur proses monitoring terhadap aktivitas dalam pengelolaan sumber daya hutan atau monitoring terhadap mereka sendiri.
- e. Mekasnisme sanksi. Menyangkut pengaturan tentang pemberian sanksi kepada pihak yang melanggar aturan operasional.

- f. Mekanisme resolusi konflik. Menyangkut mekanisme penyelesaian sengketa/ konflik pengelolaan sumber daya hutan baik di internal masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah.
- g. Pengakuan hak untuk mengelola. Pengaturan yang mengakui hak masyarakat untuk merencanakan kelembagaan mereka sendiri tidak di tolak oleh otoritas pemerintah secara eksternal.
- h. *Nested enterprises*. Menyangkut keterkaitan antara aturan operasional, aturan kolektif dan aturan konstitusional (*Appropriation, provisi, monitoring*, penegak hukum, resolusi konflik, dan aktivitas pemerintah dalam mengorganisasikan *multiple layer* pada *nested enterprises*).

Permasalahan yang sering terjadi dalam kelompok tani seperti rendahnya kualitas dalam mengelola usaha tani secara efisien. Rendahnya peran dari kelompok tani dalam berbagai program HKm yang dilakukan pemerintah Indonesia disebabkan masih rendahnya kapasitas kelembagaan kelompok tani itu sendiri.

C. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi *strengths, weakness, opportunities, dan threats* dalam suatu usaha, dengan melibatkan penentuan tujuan dari usaha tersebut dan mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang baik dan

menguntungkan untuk mencapai tujuan itu. Teknik ini dibuat oleh Albert Humphrey, yang memimpin proyek riset pada Universitas Stanford pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an dengan menggunakan data dari perusahaan-perusahaan Fortune 500 (Parulian Remus, 2015)

Dalam penelitian analisis SWOT, analisis yang digunakan adalah analisis faktor Internal dan analisis faktor eksternal. Analisis ini merupakan identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk dapat memaksimalkan kekuatan (*strenghts*) dan peluang (*opportunities*) namun secara bersamaan bisa meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*) (nyoman 2017).

1. Analisis Faktor Internal

Analisis Faktor internal adalah kegiatan menganalisis kekuatan dan kelemahan organisasi atau perusahaan dalam rangka memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman. Hal ini menjelaskan bahwa analisis faktor internal sangat berkaitan erat dengan penilaian terhadap sumber daya organisasi.

Faktor internal ini mempengaruhi terbentuknya strengths and weaknesses (S dan W). Dimana faktor ini menyangkut dengan kondisi yang terjadi dalam perusahaan, yang mana ini turut mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan (*decision making*) perusahaan. Faktor internal ini meliputi semua macam manajemen fungsional: pemasaran, keuangan, operasi, sumberdaya manusia, penelitian dan pengembangan, sistem

informasi manajemen, dan budaya perusahaan (*corporate culture*) (Richard 2018).

Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan, atau keunggulan-keunggulan lain relatif terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani atau ingin ditangani oleh perusahaan. Kelemahan adalah keterbatasan dan kekurangan sumber daya, keterampilan yang menghalangi kinerja efektif suatu perusahaan (Gusti et al., 2017).

2. Analisis Faktor Eksternal

Faktor-faktor strategis eksternal yang dapat berpengaruh bagi keberlangsungan organisasi. Faktor-faktor eksternal ini berupa peluang dan ancaman. Menurut (Gde et al., 2015) analisis faktor strategis eksternal berpusat pada situasi yang ada dan tren yang muncul dari luar, tetapi dapat berpengaruh dalam kinerja organisasi. Tujuan dilakukannya analisis eksternal adalah untuk mengembangkan sebuah daftar terbatas dari peluang yang dapat menguntungkan sebuah perusahaan dan berbagai ancaman yang harus dihindari. Peluang dan ancaman eksternal ini meliputi berbagai tren dan kejadian ekonomi, sosial, budaya, demografis, lingkungan hidup, politik, hukum, pemerintahan, teknologi dan kompetitif yang secara nyata menguntungkan, atau merugikan suatu organisasi di masa yang akan datang (Kumala, 2018)

Lingkungan perusahaan terdiri dari lingkungan umum yang terdiri dari faktor ekonomi, faktor sosial, faktor teknologi dan faktor pemerintah. Selain lingkungan umum, lingkungan industri juga mempengaruhi lingkungan perusahaan, seperti tingkat persaingan dalam industri, ancaman dari pendatang baru, kekuatan tawar menawar pemasok, kekuatan tawar menawar pembeli dan ancaman produk pengganti.

Setelah mengumpulkan informasi faktor-faktor strategis baik eksternal maupun internal yang berpengaruh terhadap kelangsungan usaha agroforestri maka perlu disusun dengan menggunakan matriks SWOT. Matriks SWOT dibangun berdasarkan hasil analisis faktor-faktor strategis eksternal maupun internal yang disusun empat strategi utama yaitu: SO, WO, ST dan WT (Patoding et al., 2018).

Tabel 1. Matriks SWOT

FSI FSE	<i>Strengths (S)</i> Faktor-faktor kekuatan internal	<i>Weaknesses (W)</i> Faktor-faktor kelemahan internal
<i>Opportunities (O)</i> Faktor-faktor peluang eksternal	<i>Strategi SO</i> Menggunakan kekuatan dengan memanfaatkan peluang	<i>Strategi WO</i> Meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
<i>Threats (T)</i> Faktor-faktor ancaman eksternal	<i>Strategi ST</i> Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	<i>Strategi WT</i> Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Sumber: (Muyunika, 2015)

Penyusunan Matriks SWOT berdasarkan faktor – faktor strategi eksternal dan internal yang ada. Dari analisis SWOT tersebut akan mendapatkan empat strategi yaitu strategi SO (*Strength–Opportunities*), ST (*Strength–Threats*), WO (*Weaknes – Opportunities*) dan WT (*Weaknes – Threats*) (Azizah et al., 2021).

Berikut ini keterangan dari matrik SWOT (Patoding et al., 2018)

a. Strategi SO

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan (petani agroforestri) yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.

b. Strategi ST

Strategi ST yaitu menggunakan seluruh kekuatan untuk mengatasi ancaman.

c. Strategi WO

Strategi ini berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.

d. Strategi WT

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dengan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

D. Analisis AHP

Analytical Hierarchy Process merupakan suatu metode pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multi faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu *hierarki*. Menurut Saaty dalam Munthafa & Mubarak, (2017), *hierarki* didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multilevel dimana level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, sub kriteria, dan seterusnya hingga level terakhir dari alternatif. *Analytical Hierarchy Process* digunakan sebagai metode pemecahan masalah dibanding dengan metode yang lain karena alasan-alasan berikut:

- a. Struktur yang berhierarki, sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih, sampai pada sub kriteria yang paling dalam.
- b. Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi sebagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh pengambil keputusan.

AHP ini juga banyak digunakan pada keputusan untuk banyak kriteria, perencanaan, alokasi sumber daya dan penentuan prioritas dari strategi-strategi yang dimiliki pemain dalam situasi konflik (Imam, 2019). Langkah-langkah dalam pelaksanaan AHP adalah menurut Saaty dalam (Azhar, 2019) yakni:

- a. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan, lalu menyusun hirarki dari permasalahan yang dihadapi.

Menyusun hirarki adalah kemampuan manusia untuk mempersepsikan benda dan gagasan, mengidentifikasikannya, dan mengkomunikasikan apa yang mereka amati. Untuk memperoleh pengetahuan terinci, pikiran kita menyusun realitas yang kompleks kedalam bagian yang menjadi elemen pokoknya, dan kemudian bagian ini dibagi kedalam bagian-bagiannya lagi, dan seterusnya secara hierarki.

- b. Menentukan prioritas elemen

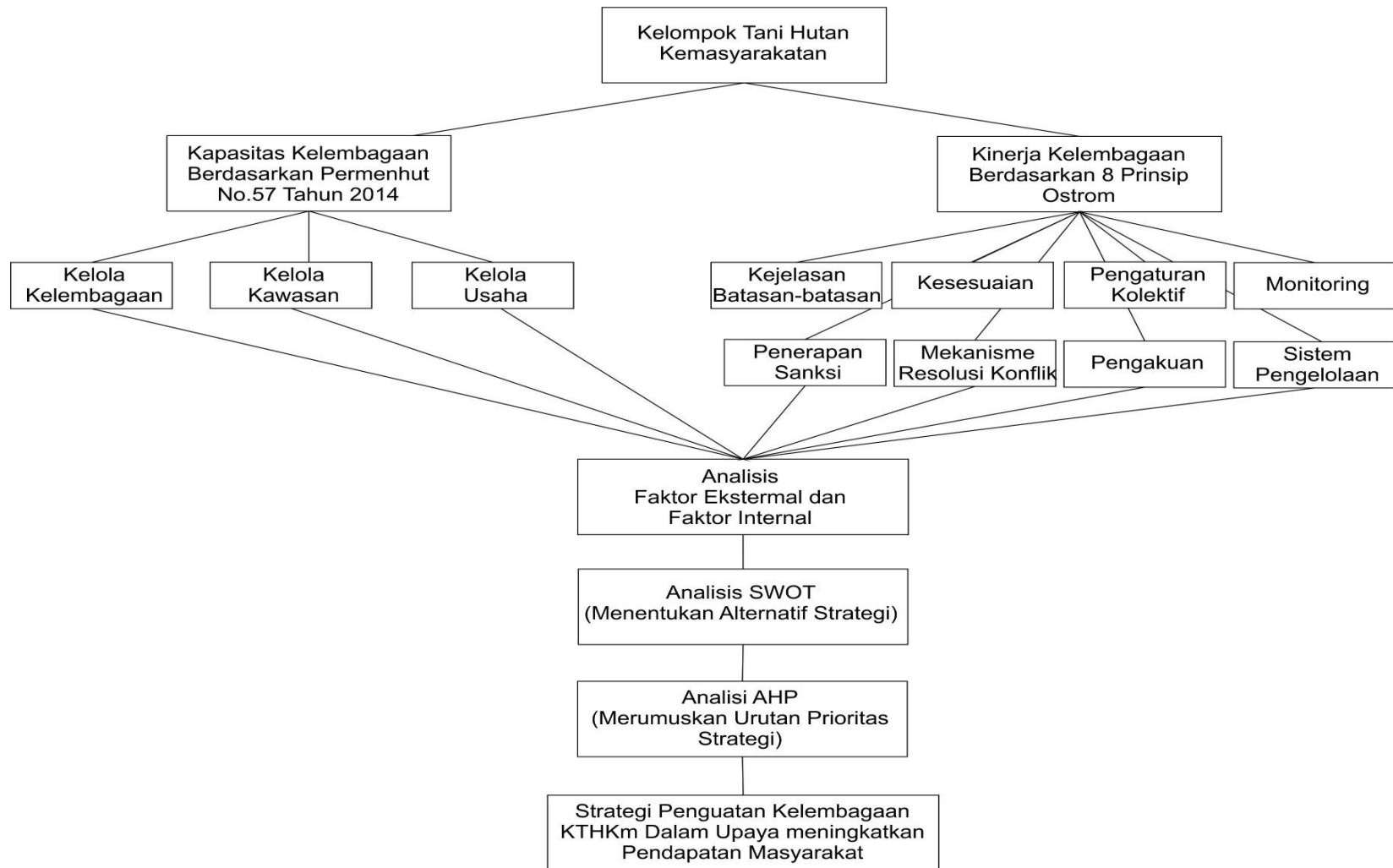
Langkah pertama dalam menentukan prioritas elemen adalah membuat matriks perbandingan pasangan. Matriks perbandingan berpasangan diisi menggunakan bilangan untuk mempresentasikan kepentingan relatif dari suatu elemen terhadap elemen yang lainnya.

- c. Sintesis

Pertimbangan-pertimbangan terhadap perbandingan berpasangan disintesis untuk memperoleh keseluruhan prioritas.

- d. Mengukur konsistensi

Dalam pembuatan keputusan, penting untuk mengetahui seberapa baik konsistensi yang ada karena kita tidak menginginkan keputusan berdasarkan pertimbangan dengan konsistensi yang rendah.



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian